

## **Bab V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Ketahanan Nasional dan kemandirian bidang kesehatan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara umum kemandirian Indonesia di bidang kesehatan terutama sekali dalam program penanggulangan HIV/AIDS khususnya dalam menyediakan akses layanan untuk pengobatan AIDS bagi masyarakat. Kemandirian bukan hanya dari segi pembiayaan, akan tetapi juga dari segi bantuan yang diterima oleh negara berkembang. Kalau dulu penjajahan terlihat langsung dengan menggunakan militer atau tentara, sekarang mereka justru hanya menggunakan berbagai bantuan yang menyebabkan ketergantungan. Baik itu yang berbentuk bantuan ekonomi atau bantuan kemanusiaan lainnya.

Dari pembahasan tentang kasus penanggulangan AIDS di Indonesia, pengadaan obat ARV, pengembangan vaksin flu burung dan laboratorium Namru nampak perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal ini Indonesia. Pada upaya penanggulangan AIDS Indonesia mengharapkan dapat mengendalikan AIDS dengan kekuatan sendiri dan bantuan negara sahabat. Namun bantuan yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan nyata. Bantuan tersebut bukanlah dana atau tenaga pakar yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut telah dirancang terlebih dahulu dan sudah tentu memuat kepentingan dari pemberi bantuan.

Sebagai contoh negara pemberi bantuan memilih daerah yang akan dibantu bukan berdasarkan keinginan Indonesia. Pemilihan tersebut berdasarkan kepentingan nasional negara pemberi bantuan misalnya daerah tujuan wisata atau daerah yang erat kontakannya dengan pemberi bantuan. Bidang yang akan dibantu juga lebih ditentukan oleh pemberi bantuan. Hak asasi manusia misalnya menjadi isu sentral dan mendapat dukungan alokasi dana yang besar sementara kebutuhan Indonesia lebih kepada upaya pencegahan dan terapi. Unsur sosial budaya setempat yang merupakan faktor penting kurang mendapat perhatian dan budaya setempat acapkali diberi label tradisional dengan konotasi ketinggalan zaman dan harus ditinggalkan. Padahal tak mungkin memisahkan manusia dan budayanya. Perhitungan keuangan juga menunjukkan bahwa bantuan asing kembali ke negara donor melalui honor konsultan, pembelian teknologi dan peralatan. Isu yang dihindarkan adalah mutu dan sertifikasi yang membatasi penggunaan teknologi lokal meski lebih murah dan lebih tepat.

Pengadaan obat ARV murah yang kemudian cuma-cuma di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan untuk mengadakan obat tersebut akan berhasil jika terjadi sinergi antara pemerintah (dalam hal ini adalah keputusan presiden) dan lembaga swadaya masyarakat (aktivis AIDS) serta industri farmasi (milik pemerintah). Indonesia berhasil menjadi negara kedua di Asia Tenggara penghasil obat ARV murah meski jalan untuk mewujudkannya memerlukan perjuangan panjang.

Isu tentang berbagi hak dalam pengembangan vaksin flu burung strain Indonesia menyadarkan kita bahwa diperlukan cara berfikir yang sensitif terhadap kepentingan nasional dan tidak hanya menerima sistem yang sudah berjalan puluhan tahun yang menguntungkan negara maju. Begitu pula dengan negosiasi ulang laboratorium namru menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan nasional akan berbuah pada sikap kritis terhadap berbagai kesepakatan yang ada. Selama ini keberadaan Namru hanya diukur dari bantuan pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukannya tanpa memikirkan hasil pemeriksaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk apa dan apa pula pengaruhnya terhadap ketahanan nasional kita.

Ke empat kasus diatas menunjukkan bahwa diperlukan kepedulian terhadap kemandirian dalam bidang kesehatan. Kemandirian tersebut ditunjukkan dengan kemampuan negosiasi sehingga kepentingan nasional dapat dijaga. Dalam menerima bantuan pemerintah hendaknya dapat menjadi regulator dan koordinator yang mampu merencanakan dan mengawasi bantuan bantuan asing agar bantuan tersebut bermanfaat bagi Indonesia. Kerjasama dengan pihak lain perlu mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya adalah ketahanan nasional. Tanpa kepedulian seperti itu, ketergantungan di bidang kesehatan pada pihak luar akan tetap tinggi dan ketergantungan ini memperlemah ketahanan nasional

### **Kesimpulan :**

1. Pada tataran kebijakan khususnya dalam strategi penanggulangan AIDS pemerintah telah mempertimbangkan aspek kemandirian. Namun pada pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Indonesia masih tergantung pada pihak luar negeri. Hal itu terjadi oleh karena kurangnya dana sehingga ketergantungan pada luar negeri masih sangat besar

2. Potensi lokal yang mendukung kemandirian dalam bidang kesehatan telah mulai tumbuh. Potensi ini dapat dilihat dari kegiatan lembaga swadaya masyarakat, upaya untuk menyediakan obat ARV murah, keinginan untuk membagi manfaat dalam pengembangan vaksin flu burung serta dalam memperbaiki kerjasama mengenai laboratorium Namru.
3. Hubungan antara pemberi donor dengan penerima baik antar pemerintah maupun antar lembaga swadaya masyarakat belum setara. Pemberi donor lebih dominan dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan program.

**Saran:**

1. Kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan aspek ketahanan nasional harus terus di tingkatkan termasuk dalam bidang kesehatan. Kebijakan tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang juga memperhatikan ketahanan nasional.
2. Memupuk potensi lokal agar lebih berkembang dan dapat mendukung ketahanan nasional. Kehadiran bantuan luar negeri hendaknya memperkuat potensi lokal bukan malah memperlemah.
3. Meningkatkan posisi tawar Indonesia dengan pemberi donor untuk mewujudkan hubungan setara antara pemberi donor dan penerima bantuan. Pemerintah Indonesia harus mampu menunjukkan kebutuhan-kebutuhan yang nyata dilapangan dalam upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan kondisi & budaya Indonesia.

Kajian terhadap permasalahan kesehatan saat ini sangat penting, bukan hanya pada persoalan HIV/AIDS tapi juga pada masalah kesehatan yang lainnya seperti: flu burung, laboratorium, genetik, teknologi kesehatan, dll. Oleh karena itu kemandirian di bidang kesehatan perlu menjadi salah satu tolok ukur untuk ketahanan nasional. Kemandirian dibidang kesehatan akan menunjang ketahanan nasional. Penanganan masalah kesehatan yang tidak komprehensif mengakibatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Keadaan ini pada akhirnya menghilangkan rasa aman di masyarakat. Hilangnya rasa aman pada masyarakat membuat ketahanan nasional menjadi tidak stabil. Akibatnya adalah ketahanan nasional Indonesia akan mejadi rapuh. Oleh sebab itu perlu diadakan kajian strategis terhadap masalah ketahanan nasional dibidang kesehatan.